

**OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN DEMONSTRASI
PENOLAKAN OMNIBUS LAW TAHUN 2020 DI JAWA TIMUR**
(Analisis Isi Kuantitatif pada Koran Jawa Pos dan Surya Periode 6 – 20 Oktober
2020)

Anisa Bilqis Al Kautsar

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
anisa.17041184006@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Demonstrasi penolakan Omnibus Law pecah pada tahun 2020 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi topik yang hangat diberitakan oleh media massa. Media massa sebagai sarana penyalur informasi kepada publik haruslah memenuhi aspek netralitas dan juga memiliki independensi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah objektivitas pemberitaan terkait demonstrasi Omnibus Law yang dilakukan oleh media massa. Terkhususnya media cetak, media cetak merupakan media memiliki dampak yang besar di masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif dengan mengacu pada teori objektivitas Westerstahl (1983) dengan melakukan pengujian dengan dimensi faktualitas dan imparialitas. Yang kemudian dijabarkan dan dianalisis pada sub unit analisis tiap dimensi. Dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori Westerstahl, pada dimensi faktualitas pada media Jawa Pos dan Surya dalam menyajikan fakta, dan kelengkapan informasi cukup baik. Selain itu keduanya juga memiliki relevansi narasumber dan penentuan judul yang sesuai. Sedangkan pada dimensi imparialitas, keberimbangan berita media pada Jawa Pos dan Surya masih belum sempurna karena terdapat beberapa berita yang tidak berimbang. Pada unit analisis sifat berita, penyajian opini dan sensasionalisme pada berita terdapat beberapa berita yang cenderung mengarah pada pihak tertentu. Meskipun demikian media koran Jawa pos dan Surya harus tetap berusaha menyajikan berita-berita yang berkualitas dan berimbang kepada publik.

Kata kunci : Objektivitas, Jawa Pos, Surya, Analisis Isi Kuantitatif

Abstract

Demonstrations against the Omnibus Law broke out in 2020 which occurred in various regions in Indonesia. This is certainly a hot topic reported by the mass media. The mass media as a means of channeling information to the public must fulfill the neutrality aspect and also have independence. Therefore, this study aims to determine how the objectivity of the news related to the Omnibus Law demonstration conducted by the mass media. Especially print media, print media is a medium that has a big impact on society. To find out this, this study uses quantitative content analysis with reference to Westerstahl's (1983) theory of objectivity by conducting tests with the dimensions of factuality and impartiality. Which is then described and analyzed in the sub-unit of analysis for each dimension. From the tests that have been carried out using Westerstahl's theory, the dimensions of factuality in the Jawa Pos and Surya media present facts, and the completeness of the information is quite good. In addition, both also have the relevance of the source and the determination of the appropriate title. Meanwhile, in the dimension of impartiality, the balance of media news on Jawa Pos and Surya is still not perfect because there are some unbalanced news stories. In the unit of analysis of the nature of news, the presentation of opinion and sensationalism on news, there are several news items that tend to lead to certain parties. Even so, the Jawa Pos and Surya newspapers must keep trying to present quality and balanced news to the public.

Keywords : Objectivity, Jawa Pos, Surya, Quantitative Content Analysis

PENDAHULUAN

Pemberitaan media pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 didominasi topik tentang demonstrasi penolakan pengesahan Omnibus Law. Sebelumnya, terlebih dahulu media banyak memuat pemberitaan tentang pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang dilaksanakan pada hari Senin, 2 November 2020, oleh Presiden Joko Widodo. Berita tersebut dimuat oleh berbagai media dan menimbulkan bermacam reaksi publik. Akibat pengesahan UU tersebut, timbulah pergerakan pada berbagai wilayah di Indonesia. Rentetan peristiwa itu meramaikan pemberitaan media massa tentang topik terkait.

Berbagai macam respon muncul dari masyarakat, terlebih pengaturan pada pasal-pasal tersebut banyak yang tak dapat diterima oleh publik.

Penolakan tersebut didasari dari 12 pasal yang terdapat dalam cluster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan para pekerja buruh. Sebagaimana yang dituntutkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Penolakan tersebut diwarnai dengan banyaknya gerakan unjuk rasa yang dimulai pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 dan puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Peristiwa tersebut berlangsung hingga petang hari, dan terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa Timur.

Pemberitaan pada suatu peristiwa yang sedang atau telah terjadi, perlu diberitakan oleh media secara tepat sesuai pedoman kelayakan penyajian berita yaitu; akurat; lengkap, adil dan seimbang; objektif; ringkas dan jelas; hangat atau aktual (Kusumaningrat, 2005: 47-58). Peristiwa demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020 merupakan isu yang tengah disorot media saat itu.

Pada koran Jawa Pos dan Surya, dalam satu hari mereka dapat memuat beberapa berita dengan judul yang berbeda, terkait dengan topik tersebut. Rentetan peristiwa demonstrasi penolakan Omnibus Law perlu dilakukan publikasi yang cepat oleh media. Selain cepat (aktual), pemberitaan juga harus akurat dalam penyajiannya. Untuk itu kebenaran suatu informasi yang disampaikan ke publik haruslah dapat terkonfirmasi kebenarannya. Namun adanya tuntutan kecepatan dan lain hal terkadang membuat media menunda untuk melakukan konfirmasi atas informasi yang sudah mereka dapatkan (Toto, 2019:19).

Penyajian fakta yang akurat dan lengkap, pada pemberitaan rentetan peristiwa demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur merupakan

unsur yang terdapat pada dimensi faktualitas teori objektivitas media Westerstahl (1983).

Terlebih Jawa Timur merupakan wilayah industri yang cukup padat. Jawa Timur merupakan pusat industri dan keuangan kawasan Tengan dan Timur Indonesia (Agus Sudarmojo, 2018). Banyaknya masyarakat yang berkerja sebagai buruh dan pekerja pabrik, hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal tersebut yang membuat Jawa Timur menjadi wilayah yang cukup disorot oleh media dalam isu ini. Beberapa kali berita tentang demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur menjadi headline media surat kabar nasional seperti Jawa Pos dan Surya.

Unjuk rasa ini tentunya akan menjadi sebuah sejarah di masa depan, bagaimana pergerakan-pergerakan masih tetap hidup menjaga bangsa Indonesia. Serta pergerakan tersebut merupakan sebuah momentum yang penting bagi untuk dipelajari.

Media massa surat kabar yang masif dalam melakukan pemberitaan terkait rentetan peristiwa penolakan Omnibus Law di Jawa Timur yaitu Jawa Pos dan Surya. Koran Jawa Pos merupakan market leader, berhasil menguasai penjualan dari surat kabar di Jawa Timur. Hasil dari survei yang dilakukan oleh Roy Morgan pada tahun 2015, wilayah Surabaya dan sekitarnya, didapati koran Jawa Pos memiliki penetrasi terhadap pembaca sebanyak 50%, lebih dari itu di Surabaya dan sekitarnya pasar Jawa Pos menembus lebih dari 92%.

Koran Jawa Pos dinobatkan menjadi media cetak yang memiliki oplah terbesar pada provinsi Jawa Timur yakni lebih dari 400.000 eksemplar (Kuncoro, 2013). Selain itu Jawa Pos juga merupakan media cetak surat kabar yang memiliki oplah terbesar di Indonesia, mendominasi sirkulasi rata-rata yang mencapai 842.000 per hari menurut hasil rilis yang dilakukan oleh Nielsen Consumer Dan Media View (CMV). Menurut Nielsen, pembaca media cetak Jawa Pos jumlahnya tersebar di Surabaya dan sekitarnya.

Selain itu menyusul Jawa Pos, Surya memiliki kemampuan berkompetisi merebut pasar kalangan atas, surat kabar ini mampu bertahan di posisi kedua dengan angka sirkulasi 127.000 (Hill, 2011). Dengan oplah sebanyak 122.817 eksemplar dengan uraian 34% pembaca perempuan, dan 66% laki-laki. Berdasarkan riset IMS Nielsen (Wave 3- 2008), pembaca harian Surya mengalami pertumbuhan 22,4% dengan penyebaran meliputi 62.053 eksemplar di Surabaya, 22.129 eksemplar di Malang Raya,

21.850 di Poros Barat (Bojonegoro, Mojokerto, Madiun, Kediri) dan 16.785 di poros timur (Madura, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi), hal ini menunjukkan bahwa Surya memiliki dampak yang sangat besar di Jawa Timur.

Unjuk rasa penolakan Omnibus Law menjadi sebuah realitas sosial yang disoroti oleh media. Peneliti melihat surat kabar Jawa Pos dan Surya untuk melihat objektifitasnya dalam menyoroti realitas sosial, serta mendalami lebih lanjut apakah surat kabar tersebut memiliki kecenderungan keberpihakan atau subjektifitas tertentu. Maka dari itu objektivitas dari media perlu dijunjung tinggi. Menurut Subiakto, jika seorang jurnalis sudah menerapkan prinsip objektivitas di dalam dirinya dengan benar, otomatis tanpa berpihakpun pemberitaan pers akan menguntungkan publik atau masyarakat (Rahayu, 2006: 133).

Hal-hal diatas sangat berkaitan dengan kredibilitas, kecenderungan dan keberpihakan media, yang merupakan bagian dari dimensi teori objektivitas; faktualitas; dan imparialitas oleh Westerstahl (1983). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana objektivitas Jawa Pos dan Surya, dalam pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020. Berita tersebut dikumpulkan dari surat kabar Jawa Pos dan Surya terbitan 6 - 20 Oktober 2020. Waktu tersebut dipilih karena pada tanggal 6 Oktober 2020 merupakan demonstrasi pertama unjuk rasa penolakan Omnibus Law di Jawa Timur, yang kemudian berlanjut sampai dengan puncak demonstrasi pada 8 Oktober 2020.

METODE

Jenis penelitian menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Penelitian secara deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana objektivitas media dari isi berita demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur 2020 dalam surat kabar Jawa Pos dan Surya periode 6 Oktober – 20 Oktober 2020. *Descriptif Content Analysis* ini merupakan analisis isi yang menggambarkan secara detail deskripsi suatu pesan (teks) (Holsti, 1969).

Pada prosesnya yaitu dengan cara mengukur dan menghitung semua akumulasi dari suatu pesan yang kemudian dikodekan, ke dalam kode-kode tertentu dan kemudian dilakukan analisis serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini juga menggunakan tipe deskriptif yaitu menguraikan dan

memberikan ulasan terhadap metode analisis isi yang diterapkan.

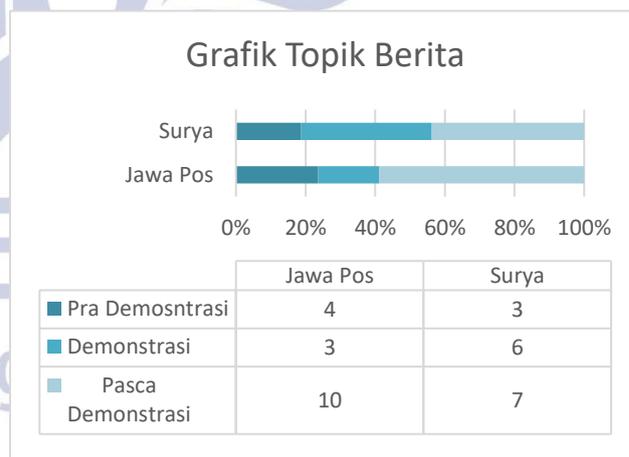
Analisis isi dioperasikan dengan menggunakan teknik coding manual dan coding sheet. Pendekatan yang dilakukan yaitu secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat menyajikan tabel, grafik, diagram ataupun ulasan. Melalui analisis isi media maka peneliti akan dapat memahami seperti apa pers dalam memandang isu atau peristiwa serta permasalahan dari unjuk rasa penolakan Omnibus Law di Jawa Timur, dan bagaimana pula pers menjalankan fungsi-fungsinya, terlebih dalam menjaga objektivitasnya memberitakan unjuk rasa penolakan Omnibus Law di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Pemberitaan dengan topik tersebut terdiri dari beberapa rangkaian peristiwa. Diantaranya terdapat pemberitaan pra-demonstrasi, ketika berlangsungnya demonstrasi, dan pasca-demonstrasi. Pada koran Jawa Pos dan Surya, pemberitaan terkait dimuat dengan frekuensi yang cukup intens, yaitu dengan masing-masing terdapat 17 berita dilakukan oleh koran Jawa Pos dan 13 berita dimuat Surya dengan topik terkait.

Grafik 1. Topik Berita Jawa Pos dan Surya



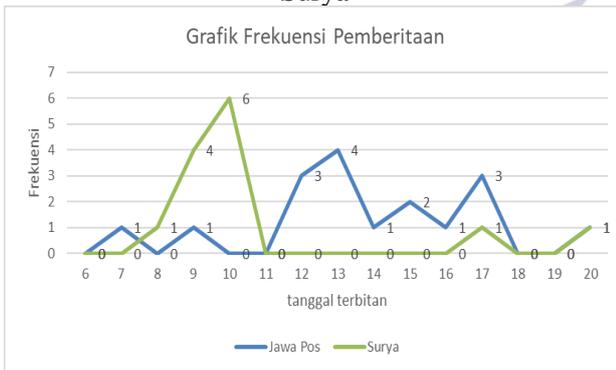
Pada penelitian ini topik pemberitaan dibagi berdasarkan garis waktu rangkaian peristiwa yang terjadi. Peneliti membagi topik pemberitaan menjadi 3 yaitu; pra-demonstrasi; demonstrasi; pasca-demonstrasi.

Peneliti memberikan kode terhadap berita-berita yang telah memenuhi variabel untuk dimasukkan dalam penelitian ini, guna mempermudah pengolahan data, sehingga lebih efektif. Pengkodean berita tersebut dipaparkan dalam

lembar coding I. Pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020 koran Jawa Pos dan Surya yang terdapat pada lampiran.

Pola frekuensi pemberitaan oleh Jawa Pos dan harian Surya memiliki dinamika yang cukup berbeda dalam melakukan pemberitaan terkait dengan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020. Pada tanggal 10 Oktober, Jawa Pos melakukan pemberitaan tertinggi dengan memuat sebanyak 6 berita, sementara Surya pada tanggal 13 Oktober dengan sebanyak 4 berita terkait.

Grafik 2. Frekuensi Pemberitaan Jawa Pos dan Surya



Seiring berjalannya waktu untuk frekuensi pemberitaan mulai mengalami kelandaian atau penurunan, topiknya sendiri didominasi oleh pemberitaan pasca- demonstrasi.

Pada tanggal 17 Oktober berita di dominasi dengan pemberitaan antisipasi terhadap demonstrasi lanjutan yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober, diantaranya ; *Deklarasi Tolak Demo Berujung Anarki; Sepakat Tolak Aksi Anarkitis di Surabaya; Jaga Gresik Aman dan Damai, Gelar Deklarasi Antianarkis; Siagakan 3.790 Personel; Amankan Demo; Sepakat Tolak Anarkisme di Kota Pahlawan.*

Kenaikan cenderung terjadi menyusul adanya agenda demonstrasi ulang pada tanggal 20 Oktober 2020 demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur. Penentuan tinggi atau rendahnya grafik frekuensi pemberitaan didapatkan dari jumlah intensitas pemberitaan yang dilakukan oleh redaksi dari kedua media tersebut.

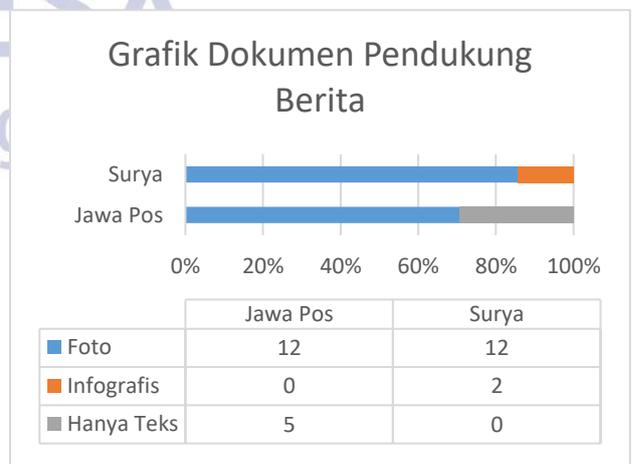
Grafik 3. Penempatan Berita Jawa Pos dan Surya



Grafik penempatan berita juga berkaitan dengan suatu pemberitaan ingin ditonjolkan oleh media. Pada grafik penempatan berita di atas, pemberitaan pada koran Jawa Pos dapat dirincikan sebagai berikut yaitu 3 (17.65%) berita sebagai headline, 3 (17.65%) berita utama, 10 (58.82%) berita terdapat di halaman dalam, dan 1 (5.88%) berita pojok. Sedangkan untuk penempatan berita pada surat kabar harian Surya, 3 (23.08%) berita merupakan headline, 2 (15.38%) berita utama, 8 (61.54%) berita terdapat pada halaman dalam.

Jika dibandingkan pada koran Jawa Pos dan harian Surya sama-sama memiliki 3 berita sebagai headline. Namun secara proporsi, presentase headline berita harian Surya (23.08%) terkait dengan topik demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Pos (17.65%).

Grafik 4. Dokumen Pendukung Berita



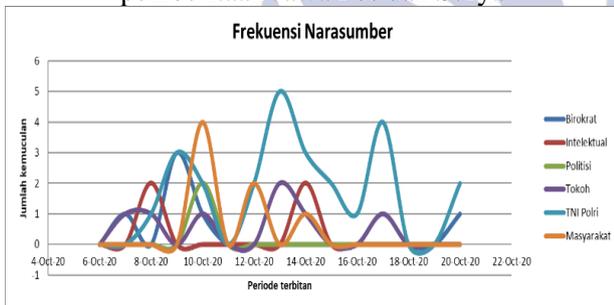
Data grafik diatas diambil dari **lembar coding III. dokumen pendukung berita** pada lampiran. Berdasarkan dari dokumen pendukung dari

pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020, dapat dirincikan sebagai berikut; secara keseluruhan sebanyak 24 (77.42%) berita mencantumkan foto ataupun gambar sebagai dokumen pendukung mereka, dan juga terdapat 2 (6.45%) berita mencantumkan infografis dalam pemberitaan, selain itu juga terdapat 5 atau (16.13%) berita yang mencantumkan teks saja tanpa pendukung lain.

Pada koran Jawa Pos sebanyak 12 (63%) menggunakan foto, sebanyak 5 (26%) hanya teks berita saja, sebanyak 2 (11%) berita tersebut terdapat infografis.

Sedangkan pada harian Surya dokumen pendukung total sebanyak 12 (86%) foto sebagai dokumen pendukung, 2 atau (14%) berita menggunakan dokumen pendukung berupa infografis. Dalam penelitian ini narasumber diklasifikasikan sebagai; birokrat; intelektual; politisi; tokoh; TNI/ Polri ; masyarakat.

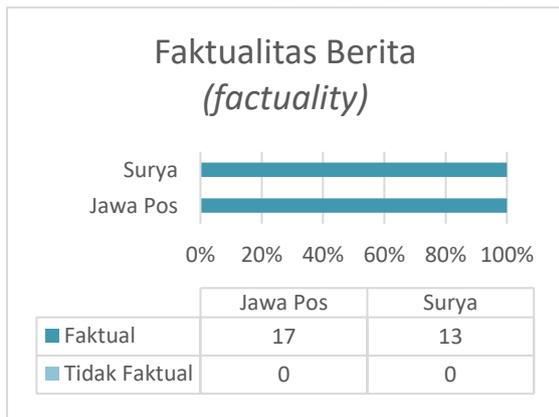
Grafik 5. Frekuensi penyebutan narasumber dalam pemberitaan Jawa Pos dan Surya



PEMBAHASAN

1. Dimensi Faktualitas

Grafik 8. Faktualitas Berita Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



Presentase faktualitas pemberitaan, terkait dengan pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur pada tahun 2020 yang dilakukan oleh kedua media tersebut 100% terindikasi sebagai faktual.

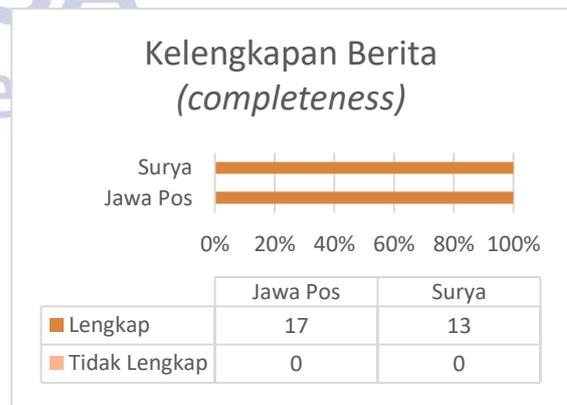
Teruntuk itu berita jug harus memperhatikan akurasi (*accuracy*). Berita yang akurat haruslah dapat dilakukan cek dan ricek kebenarannya.

Gambar 2. Penulisan fakta pada pemberitaan harian surya

SURABAYA, SURYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turun langsung meninjau lokasi yang digunakan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (8/10) petang. Aksi yang digelar di kawasan depan Gedung Negara Grahadi Surabaya itu berakhir riuh dan mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas. Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu memilih naik motor ke lokasi. Sesampainya di Jalan Gubernur Suryo itu, Risma memimpin sendiri membersihkan bekas kerucuhan di kawasan tersebut. Di lokasi banyak ditemukan pecahan batu, kaca, genteng dan potongan besi. Pantauan di lokasi, sejumlah fasilitas yang rusak itu di antaranya pagar sisi barat dan timur Gedung Negara Grahadi ambruk. Kemudian, beberapa fasilitas di Taman Apsari dan lampu penerang-

Sebagai contoh berikut, pada berita berjudul *Risma Bersihkan Pecahan Batu*. Informasi yang dimuat tersebut merupakan fakta yang dapat dikonfirmasi kebenarannya secara langsung pada pihak-pihak yang terkait (*crosscheck*). Dokumen pendukung diantaranya; foto; gambar; infografis; grafis. Hal itu harus dapat dibuktikan dari data serta fakta lapangan yang disajikan dalam sebuah berita, fakta tersebut merupakan fakta yang koheren dan terverifikasi.

Grafik 9. Kelengkapan (*completeness*) Berita pada Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



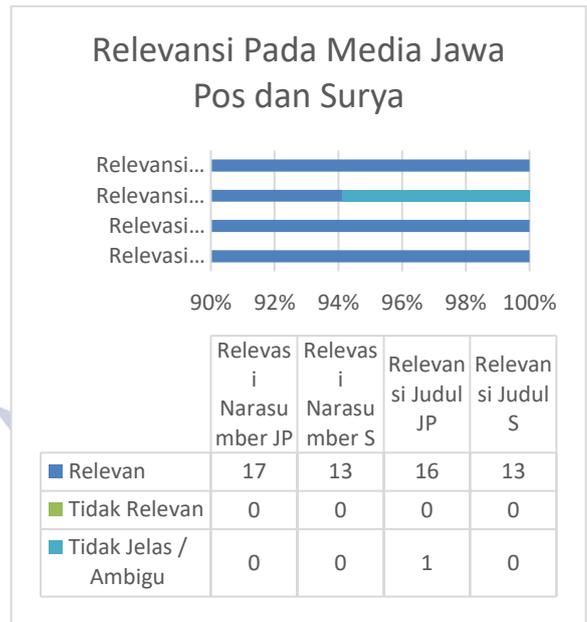
Suatu berita dapat dikatakan telah memenuhi unsur kelengkapan berita jika didalamnya memuat informasi 5W+1H (*what, who, when, why, where dan how*). Pada

pemberitaan yang dilakukan oleh Jawa Pos dan juga Surya secara keseluruhan berita memiliki tingkat 100% pada indikator kelengkapan berita. Untuk itu berita harus memenuhi unsur kelengkapan berita yang tepat sebagaimana pada contoh berikut :

Gambar 4. Contoh kelengkapan berita berita pada pemberitaan Harian Surya



Grafik 10. Relevansi (*relevance*) Pada Media Jawa Pos dan surya



Relevansi narasumber pada grafik diatas menunjukkan bahwa masing-masing Jawa Pos dan Surya memiliki narasumber yang relevan dengan persentase 100%. Sebanyak 17 (100%) berita Jawa Pos dan 13 (100%) berita Surya.

Relevansi judul juga merupakan aspek yang penting dalam sebuah pemberitaan. Jawa Pos sebanyak 16 (94,12%) berita memiliki judul yang relevan dengan isi berita. Sementara 1 (5,88%) dinyatakan memiliki judul yang tidak jelas. Berita Jawa Pos dengan kode berita JP14 dengan judul *Deklarasi Damai Tolak Demo Berujung Anarki* dianggap ambigu, karena dengan judul seperti itu dapat menghasilkan beberapa penafsiran. Kemungkinan diantaranya; kegiatan deklarasi damai tolak demo berujung anarki; atau, penyelenggaraan deklarasi damai yang menolak adanya demo yang berujung anarki.

Harian Surya terkait dengan pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020, sebanyak 13 (100%) berita disajikan dengan judul yang sesuai dengan isi berita.

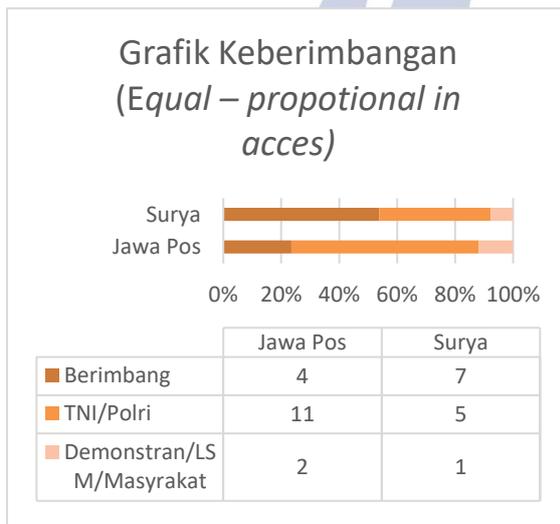
Di atas merupakan contoh berita yang telah memenuhi unsur kelengkapan yang tepat. Berita dengan judul *Ajak Mahasiswa Izin Kuliah* yang dimuat oleh harian Surya pada tanggal 10 Oktober 2020 tersebut telah memenuhi unsur kelengkapan berita, karena didalamnya memuat informasi yang dapat menjawab indikator 5W+1H.

Pada dimensi faktualitas juga terdapat unit analisis relevansi (*relevance*). Pada penelitian ini kategori relevansi meliputi yaitu; relevansi judul, judul berita yang relevan untuk menghindari ambiguitas; relevansi narasumber, narasumber yang relevan dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada grafik berikut:

2. Dimensi Imparsialitas

Keberimbangan merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam dimensi imparsialitas. Media harus melakukan pemberitaan dengan seimbang dalam menggambarkan nilai positif ataupun negatif dari sebuah subjek yang diberitakan sehingga menemukan titik seimbang (*event handler*). Selain hal-hal diatas, penelitian ini peneliti juga mengukur beberapa unit analisis aspek keberimbangan (*balance*); *equal or propotional*; *even handed*, dan netralitas (*neutrality*); *non-evaluative*; *non-sesasionalism*.

Grafik 11. Keberimbangan (*Equal – propotional in acces*) Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



Untuk melihat apakah berita tersebut berimbang maka berita harus *equal or propotional acces*. Artinya menyajikan pendapat atau informasi pihak-pihak terkait dalam berita disajikan secara proporsional. Dari hasil analisa keseluruhan 30 berita terdapat sebanyak 19 (63,33%) berita disampaikan dengan tidak proporsional. Sementara itu terdapat 11 (36,67%) berita yang di dalam penulisannya disajikan dengan proporsional berimbang (*cover both side*).

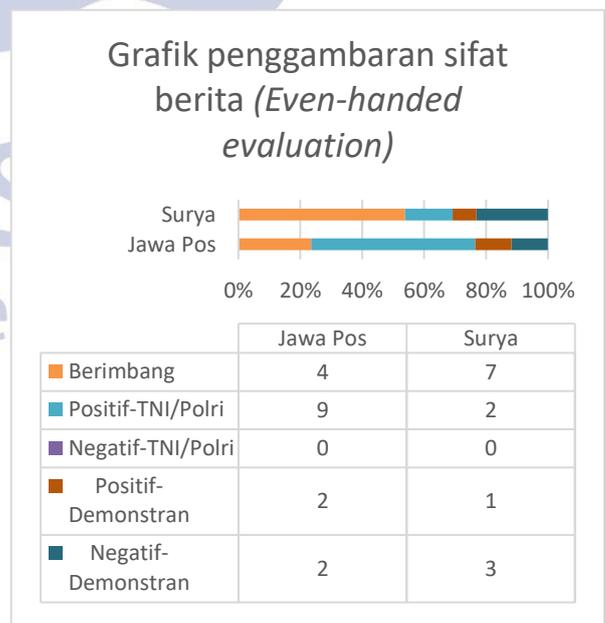
Jawa Pos terdapat 4 (23.53%) berita yang proporsional dari total 17 berita. Sisanya memiliki kecenderungan terhadap subjek tertentu. Berita tidak berimbang tersebut dengan rincian 11 (64.71%) berita memiliki kecenderungan terhadap subjek TNI/Polri. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan pemberitaan Jawa Pos dengan

kecenderungan subjek kepada demonstran atau ormas yaitu sebanyak 2 (11.76%) berita.

Surya terdapat 7 (53.85%) berita proposional berimbang. Dan sisanya disajikan tidak proposional, diuraikan sebagai berikut, 5 (38.46%) berita memiliki kecenderungan pemberitaan terhadap subjek TNI/Polri. Sebanyak 1 (7.69%) berita dengan kecenderungan subjek kepada demonstran.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Jawa Pos melakukan pemberitaan tertinggi dengan kecenderungan kepada TNI/Polri sebanyak 11 (64.71%) berita. Sedangkan pada harian Surya memiliki pemberitaan tertinggi yang berimbang yaitu sebanyak 7 (53.85%) berita. Pada kedua media tersebut juga cukup tinggi kecenderungan pemberitaan dengan subjek TNI/Polri yaitu; Jawa Pos sebanyak 11 (64.71%) berita, dan harian Surya sebanyak 5 (38.46%) berita. Jawa Pos dan Surya juga memiliki kecenderungan pemberitaan yang rendah terhadap subjek demonstran ataupun organisasi masyarakat yang terlibat demonstrasi penolakan Omnibus Law tahun 2020 di Jawa Timur yaitu sebanyak; 2 (11.76%) pemberitaan Jawa Pos dan 1 (7.69%) pemberitaan oleh Surya.

Grafik 12. Sifat Berita Pemberitaan (*Even-handed evaluation*) Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



Selain berita harus disajikan secara proporsional, berita juga harus memiliki nilaiimbang dalam menyajikan informasi. Apakah sebuah berita bersifat positif, negatif atau netral.

Untuk mengetahui informasi tersebut maka dapat dilihat pada grafik diatas dengan rincian sebagai berikut :

Pada aspek penyajian sifat berita positif dan negatif berimbang (*even handed*), terdapat sebanyak 11 (36.67%) berita sisi positif dan juga negatif disajikan secara berimbang (*even handed*). Sementara terdapat sebanyak 19 (63.33%) berita disajikan tidak berimbang. Keberimbangan sisi positif dan negatif ini menjadi penting untuk disampaikan agar masyarakat mengetahui dengan utuh, tidak hanya dari satu sisi saja yang dapat menimbulkan sebuah bias informasi.

Jika diuraikan pada masing-masing media Jawa Pos dan Surya maka sebagai berikut; pada Jawa Pos dari 17 pemberitaan yang dilakukan, terdapat sebanyak 4 (23.53%) berita berimbang (*even handed*) yang memuat kedua subjek terkait. Sebanyak 9 (52.94%) berita bersifat positif kepada TNI/Polri. Tidak terdapat berita bersifat negatif kepada TNI/Polri. Penyajian sifat berita dengan subjek demonstran dan masyarakat yang terkait di dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law tahun 2020 di Jawa Timur terdapat 2 (11.76%) berita bersifat positif, dan 2 (11.76%) berita bersifat negatif.

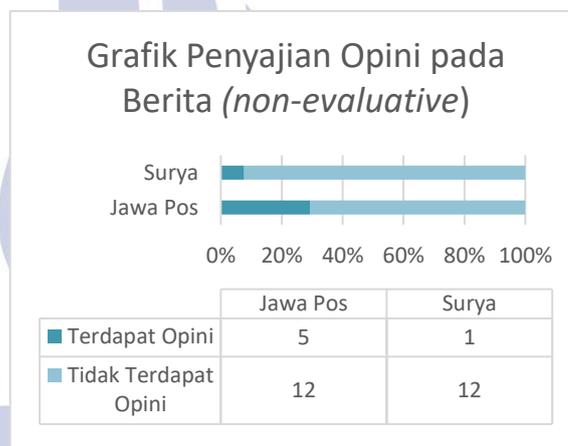
Pada harian Surya dari 13 pemberitaan yang dilakukan, 7 (53.85%) berita dianggap berimbang karena memenuhi sifat (*even handed*). Terdapat 2 (15.38%) berita yang bersifat positif terhadap TNI/Polri, dan 0 berita bersifat negatif terhadap TNI/Polri. Penyajian sifat berita pada demonstran maupun masyarakat yang terkait dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law tahun 2020 di Jawa Timur terdapat 1 (7.69%) berita bersifat positif, dan 3 (23.08%) berita bersifat negatif.

Apabila dibandingkan dari kedua media tersebut, berita berimbang harian Surya lebih tinggi daripada Jawa Pos, yaitu sebanyak 7 (53.85%) berita berimbang pada Surya. Sedangkan pada Jawa Pos hanya terdapat 4 (23.53%) berita berimbang. Berita positif terhadap TNI/Polri Jawa Pos lebih tinggi yakni terdapat 9 (52.94%) berita, sedangkan pada harian Surya hanya terdapat 2 (15.38%) berita. Sama halnya dengan Jawa Pos harian Surya dalam pemberitaan negatif TNI/Polri sama-sama 0 pemberitaan. Pemberitaan bersifat positif kepada demonstran ataupun masyarakat yang terkait dalam demonstrasi penolakan

Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020 pada Jawa Pos terdapat 2 (11.76%) pemberitaan. Sedangkan pada harian Surya terdapat 1 (7.69%) pemberitaan. Pemberitaan bersifat negatif kepada demonstran pada Jawa Pos terdapat 2 (11.76%) berita, sedangkan pada harian Surya terdapat 3 (23.08%) berita.

Selanjutnya pada skema netralitas (*neutrality*), terdapat tolok ukur pada netralitas yaitu meliputi unit analisis *non-evaluative* dan *non-sensational* (McQuail, 1992:203). *Non-evaluative* adalah keberadaan atau tidak adanya percampuran antara fakta dan opini dalam sebuah berita. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 13. Penyajian Opini (*non-evaluative*) Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



Berita objektif adalah berita yang tidak memihak pada pihak ataupun mengarahkan publik pada tujuan tertentu. Sebuah media juga harus independen, berintegritas, dan objektif dalam melakukan pemberitaan, sehingga integritas dari media tersebut juga dapat diandalkan oleh publik.

Keberadaan adanya opini pribadi yang dicantumkan oleh penulis adalah misalnya penggunaan kata-kata seperti; agaknya; tampaknya; diduga; rupanya; dan kata-kata yang bersifat opini lainnya.

Hasil temuan unit analisis *non-evaluative* dari pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut Jawa Pos dan juga harian Surya pada periode 6 - 20 Oktober 2020. Dari 30 berita, ditemukan sebanyak 6 (20%) berita terdapat opini yang diselipkan dalam pemberitaan tersebut. Sebanyak 24 (80%) berita tidak memiliki opini yang diselipkan pada pemberitaan tersebut. Pada Jawa Pos sebanyak

3 (17.65%) berita mengandung opini, dan 12 (70.59%) tidak mengandung opini. Pada Hariian Surya 1 (7.69%) berita mengandung opini, dan 12 (92.31%) berita tidak mengandung opini pribadi.

Gambar 5. Contoh penyajian opini dan narasumber didalam berita Jawa Pos



Berikut dapat dilihat contoh penyajian opini di dalam sebuah berita dengan judul *Ngendus Perusuh, Cokok 36 ABG* yang dimuat oleh Jawa Pos pada tanggal 14 Oktober 2020, cukup kental dalam penyajian opini. Opini tersebut didapatkan dari kutipan narasumber dan penyampain opini penulis secara tersurat dalam berita tersebut. Pada berita tersebut memiliki cukup banyak narasumber, yaitu terdapat 7 narasumber yang pernyataannya dikutip dalam berita.

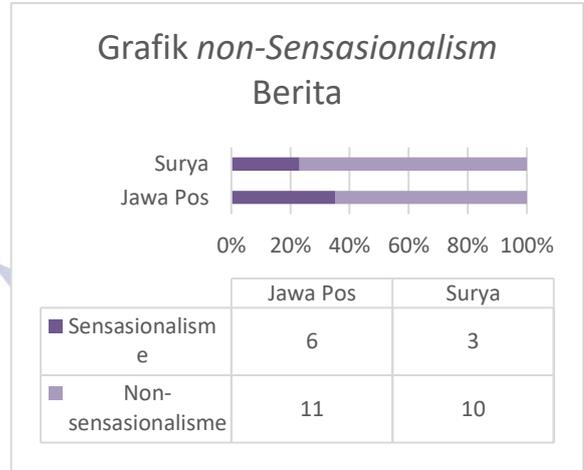
Penulis disini memilih pilihan kata 'abg' cukup kerap disebutkan. Pemilihan kata itu tentunya merupakan pilihan dari penulis, karena para narasumber tidak ada yang memanggil atau menyebut para perusuh dengan sebutan abg.

Selain itu terdapat pernyataan penulis dalam berita, hal itu bisa saja menjadi upaya untuk menggiring opini pribadi melalui tulisan. Contohnya pada kalimat "apakah benar para abg itu akan berbuat kerusakan di sela aksi massa yang kabarnya akan dilaksanakan pada hari itu? Benarkah ada pihak tertentu yang berada dibelakang para abg tersebut? Dengan kata lain ada pihak-pihak tertentu yang menggerakkan para abg tersebut?".

Sementara itu pembahasan yang terdapat pada berita tidak ada yang dapat menjawab dari

pertanyaan tersebut, juga tidak mampu untuk menjawab ataupun membenarkan hal yang ditanyakan oleh sang penulis.

Grafik 14. Non-sensasionalism Berita Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020



Sensasionalism sifat yang menimbulkan sensasi dengan tujuan untuk menarik perhatian orang atau pembaca (McQuail dalam Rahayu, 2006:24). Berita dikatakan mengandung unsur sensasionalisme ketika berita tersebut lebih mengacu pada *human interest*, personalisasi dan karakteristik hiburan lainnya dalam berita.

Pada indikator *sensasionalism* terdapat 9 (30%) berita sensasional dari media Jawa Pos dan juga harian Surya, sisanya sebanyak 21 berita (70%) berita *non-sensasional*. Jawa Pos sebanyak 6 (35,29%) berita mengandung unsur *sensasionalism* 11 (64,71%) berita *non-sensasionalism*. Pada harian Surya 3 (23,08%) berita mengandung unsur *sensasionalism* sedangkan 10 (76.92%) berita *non-sensasionalism*.

Pada grafik di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Jawa Pos dalam penulisan judul ataupun isi berita terkait dengan pemberitaan penolakan demonstrasi Omnibus Law tahun 2020 di Jawa Timur sebagian besar *non-sensasionalism*. Kondisi tersebut menunjukkan pemberitaan oleh Jawa Pos pada dasarnya berusaha menyajikan berita yang original dan apa adanya, pesan disampaikan secara teras terang, langsung, dan juga tidak banyak mengandung nuansa dramatisasi yang berlebihan.

Sementara itu pada harian Surya terkait dengan pemberitaan demonstrasi penolakan

Omnibus Law tahun 2020 Jawa Timur terdapat sebanyak 10 (76.92%) berita yang disajikan *non-sensasionalism*, dan terdapat 3 (23.08%) berita yang penyajiannya mengandung unsur *sensasionalism*.

Berikut merupakan berita-berita yang terindikasi mengandung *sensasionalism* pada harian Surya yaitu diantaranya; *Risma bersihkan pecahan batu*; *Risti Terisak saat Jemput Anak di Polda Jatim*; dan *Bersimpuh, Minta Maaf Lalu Nangis*. Ketiga berita tersebut dapat dikategorikan sebagai *sensasionalism*, hal ini dapat terbentuk dari pemilihan kata yang digunakan oleh penulis.

Gambar 6. Contoh berita *sensasionalism* pada harian Surya



Pada contoh berita diatas telah memenuhi *sensasionalism* unsur personalisasi. Personalisasi ini dapat diklaim ketika jurnalis media secara sengaja atau tidak sengaja menonjolkan *person* dibandingkan peristiwanya (Jurnal Dewan Pers, 2014:8). Penyebutan tokoh publik, atau aktor yang terkenal untuk dijadikan judul berita. Berita dengan judul *Risma bersihkan pecahan batu*, hal tersebut telah memenuhi unsur personalisasi, yang secara tidak langsung menarik minat pembaca untuk mengetahui dan membaca lebih lanjut dari berita itu.

Unsur personalisasi pada pemberitaan diartikan pandangan yang melihat aktor politik atau individu tertentu sebagai aktor yang berpengaruh dalam sebuah peristiwa (McQuail dalam Rahayu, 2006:24). Sosok Risma disini merupakan tokoh yang terkenal di masyarakat, memiliki banyak penggemar dan dapat menarik simpat. Pemilihan judul tersebut tentunya juga dapat menarik perhatian audiens dibandingkan dengan berita yang judulnya sekedar Walikota yang mendatangi lokasi pasca-demonstrasi.

PENUTUP

Simpulan

Analisis dari pemberitaan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur tahun 2020 oleh media Jawa Pos dan Surya yang didapatkan pada penelitian ini secara komprehensif dengan menggunakan teknik analisis isi kuantitatif deskriptif. Objektivitas pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut diuji menggunakan teori objektivitas media oleh Westerstahl (1983). Untuk dapat mengetahui objektivitas tersebut peneliti dengan seksama melakukan pengumpulan data, yang kemudian diolah. Untuk terpenuhinya teori dari objektivitas media Westerstahl (1983), terdapat dua dimensi yang harus dipenuhi yaitu dimensi faktualitas dan imparisialitas. Dengan terpenuhinya beberapa unit analisis pada dimensi-dimensi tersebut maka suatu berita dapat dikatakan sebagai objektif.

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan dimensi faktualitas berita pada Jawa Pos dan Surya cukup tinggi. Dari unit analisis keduanya menunjukkan memiliki nilai unsur faktual, akurasi, kelengkapan dan relevansi yang cukup tinggi yaitu dengan presentase diatas 90%. Pada dimensi keberimbangan (*impartiality*) menunjukkan keberimbangan berita dan *even handed* yang masih cukup rendah.

Berdasarkan hasil temuan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberitaan tentang demonstrasi penolakan Omnibus Law tahun 2020 di Jawa Timur, koran Jawa Pos dan Surya telah berusaha menyajikan berita yang objektif dengan memenuhi standar dimensi faktualitas, namun belum sepenuhnya memenuhi dimensi imparisialitas.

Saran

Pada skripsi ini kedua media Jawa Pos dan Surya merupakan media yang cukup dikenal oleh publik, memiliki cakupan cukup luas khususnya di Jawa Timur. Jawa Pos dan Surya perlu menjaga dan meningkatkan keberimbangan dan netralitas beritanya, pemberitaan dapat dilakukan dengan cara tetap menjunjung tinggi objektivitas dengan memperhatikan kualitas dari berita dengan menggunakan prinsip objektivitas.

Teruntuk saran dari peneliti secara akademik, kepada bibit ataupun calon peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau metode yang sama pada penelitian ini maka disarankan untuk dilakukan secara komprehensif dan mendetail, dengan mengikuti garis waktu peristiwa demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jawa Timur

pada waktu-waktu sebelumnya maupun selanjutnya. Selain itu peneliti juga menyarankan untuk dapat mempertimbangkan sub atau turunan dari unit analisis keberimbangan (*balance*); *cover both side*; *slant*; *source bias* dan unit analisis netralitas (*neutrality*); *sensasionalism* (personalisasi, *emotionalism*, dramatisasi); *stereotype*; *juxtaposition*; *linkage* (McQuail dalam Rahayu: 23-25), agar hasil yang didapatkan lebih detail dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudarmojo, Slamet (7 Mei 2018). "Khofifah: Perekonomian Indonesia Timur bergantung Jawa Timur". Antara News. Diakses tanggal 14 Juli 2020
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Dja'lar ULH. 1991. *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Berelson, Bernard. 1952. *Content Analysis in Communication Research*. New York: The Free Press.
- BPS Provinsi Jawa Timur. "PDRB Povinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (sub kategori) Tahun 2010-2016 (Milyar rupiah)". 2016
- Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media. Hal 31
- Effendy, Onong. 1993. *Komunikasi dan Praktek*. Bandung, Remaja Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grasindo. Rosdakarya.
- Eriyanto. 2011. *Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. Hal 290
- Hill, D.T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Holsti, Ole R. 1969. *Content Analysis for the Sosial Science and Humanities*. Reading. Massachusetts: Addison – Westley Publishing.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisaso, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Kuncoro, M. 2013. *Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik, Teori dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lasswell. Fluornoy, D.M., 1989. *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*. Gadjamada University Press, Yogyakarta.
- Litbang Kompas, Sentra Media. 2003. *Laporan Penelitian Pola Pemberitaan Media Terhadap Konflik Di Propinsi Nangroe aceh Darussalam (NAD)*, Fisip Undip, Semarang
- Maras, steven. 2013. *Objectivity in Journalism*. polit press
- McQuail, Denis. 1992. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar edisi ke-dua*. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuails*. Jakarata: Salemba Humanika.
- Nielsen, 2017 : Jawa Pos Koran No 1 Indonesia. www.pressreader.com. Diakses tanggal 08 Desember 2020.
- Rahayu, et al. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Surat Kabar Di Indonesia (PKMBP, Dewa Pers dan DPL.)*
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta: Bandung.
- Siahaan, S.M. 1991. *Komunikasi: Pemahaman dan Penerapannya*. BPK Gunung Mulia : Jakarta.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Toto, R. S. 2019. *Panduan Menjadi Jurnalis Profesional*. Yogyakarta: Araska
- Westerståhl, J. 1983. *Objective News Reporting: General Premises*. Communication Research.
- Widodo. 1997. *Teknik Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Yusuf, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group